

## RESENSI BUKU



Judul : Indonesia Bergerak! : Percik  
Pemikiran Komunitas Sekip  
untuk Perubahan

Editor : Agus Pramusinto dan Erwan  
Agus Purwanto

Penerbit : MAP UGM dan Pustaka  
Pelajar

Kolasi : x + 340 halaman

ISBN :

### Indonesia Bergerak : Memungut Masalah Yang Terserak

Judul buku ini menghentak, *Indonesia Bergerak!* Alih-alih bergerak, mungkin saja kita akan tersentak oleh sekian banyak masalah yang mendera negara kita.

Membaca buku ini seperti membuka brankas yang berisi masalah-masalah yang sedang mendera Indonesia dewasa ini. Para penulis berusaha memberikan tafsiran dan penjelasan mengenai berbagai gejala, sekaligus memberikan sebetulnya saran untuk megatasinya. Dari masalah ekonomi, politik, agraria, sampai perburuhan.

Ilham, misalnya, menulis tentang masalah klasik negeri ini, yakni soal teror dan kerukunan dalam masyarakat (Bab 5). Ia mulai dengan konsep Samuel Huntington tentang benturan peradaban. Seturut dengan konsep ini, Ilham menyatakan bahwa persoalan kultural, seperti etnis dan agama, lah yang akan menjadi biang pertikaian antar warga di Indonesia, selain soal ideologi dan ekonomi. Fenomena konflik bersenjata di Aceh dan Papua adalah contohnya. Menurutnya, kebijakan desentralisasi kebijakan pasca Orde Baru menjadi faktor penting. Daerah-daerah yang dulunya sepenuhnya terkontrol oleh pusat, sekarang mendapatkan angin segar untuk menentukan nasibnya sendiri. Konflik kepentingan dan etnis dalam tiap daerah menjadi tak terelakkan dan wajib diantisipasi oleh pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan desentralisasi ini tidak dibarengi

dengan penegakan hukum di tingkat atas sendiri. Pemerintah pusat belum menyadari konsekuensi yang ditimbulkan kebijakan ini : desentralisasi mengandaikan kebebasan, namun juga membutuhkan kontrol ketat dari pusat.

Tulisan dalam Bab 3 pun membahas masalah laten Indonesia, konflik agraria. Muhtar Habibi memberikan sedikit ulasan konflik agraria dunia dalam kerangka marxian, modernis dan populis. Ia kemudian meneropong kebijakan "Revolusi Hijau" nya Soeharto. Kebijakan yang mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada beras pada 1984 ini, pada akhirnya justru tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski oleh Bank Dunia, Indonesia sejak era ini dinobatkan sebagai "*transforming countries*", nyatanya 64% penduduk desa tetap berada dalam di bawah garis kemiskinan (BPS 2010). Kesenjangan kepemilikan tanah pun makin menuju tingkat yang memprihatinkan (hal. 265). Namun, ia tampaknya agak tergesa-gesa saat mengajukan kritik soal kurangnya studi transformasi agraria yang komprehensif di Indonesia. Mungkin, kajian serius dari Mubyarto, Masri Singarimbun, Sartono Kartodirdjo, --atau yang lebih kontemporer-- Ahmad Nashih Luthfi, dan Noer Fauzi soal transformasi dan reforma agraria luput dari genggamannya saat menulis.

Kedua tulisan di atas adalah satu gugus jenis tulisan di buku ini yakni tafsiran konseptual atas gagasan dan masalah umum di negeri ini. Gugus ini juga diwakili oleh Sayfa Aulia Achidsti dalam *Pembangunan di Negara Berkembang*, Antonius Galih Prasetyo dalam *Membongkar Dikotomi Teknokrat-Politisi*, dan Yuli Isnadi.

Yuli Isnadi, dalam *Birokrasi Lemah* (Bab 3), nampaknya penulis yang paling "berani". Ia mengajukan keberatan sembari memberikan alternatif pandangan soal lemahnya birokrasi di Indonesia. Yuli menanggapi paparan dari Kuskrido Ambardi yang berusaha menjelaskan nalar maraknya korupsi di berbagai kementerian negara. Baginya, penjelasan Ambardi bahwa fenomena korupsi ini disebabkan oleh kartelisasi partai kurang memadai. Memang partai cenderung membentuk kartel politik, tetapi "analisis politik kartel memahaminya semata dari sisi parpol dan mengabaikan kementerian sebagai sebuah birokrasi" (hal. 66).

Menurutnya, birokrasi kementerian bukanlah "atom-atom pasif" yang dapat diotak-atik sesuai dengan parpol yang berkuasa. Birokrasi memiliki dinamikanya sendiri meliputi dinamika internal, pemosisian birokrasi oleh negara dan pandangan rakyat terhadapnya. Tiga faktor inilah yang mesti menjadi tambahan eksplanan bagi gejala korupsi di birokrasi. Dengan bahasa sederhana, Yuli memberikan pertanyaan retorik, bagaimana mungkin parpol bisa [melakukan] korupsi di birokrasi, jikalau birokrasi itu sendiri tidak memiliki kehendak untuk melakukannya? Kombinasi antara bobroknya birokrasi dan hegemoni partai di dalamnya lah yang memungkinkan suburnya korupsi.

Gugus lain dari tulisan dalam buku ini adalah ikhtiar untuk menafsirkan fenomena kontemporer dan kasuistik yang terjadi di Indonesia. Arif Rahman (Bab 17), misalnya, berusaha menjelaskan konflik kepentingan dalam kebijakan kenaikan BBM. Argumentasi pendukung kenaikan BBM berkisar soal kenaikan harga minyak dunia, penyeimbangan neraca keuangan negara dan "keadilan" penerimaan subsidi. Subsidi BBM akan dialihkan pada sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka yang menolak kebijakan ini

pun memiliki argumen yang masuk akal. Secara makro, memang kebijakan ini mungkin saja akan menguntungkan, namun di level mikro ekonomi kebijakan ini tak bisa lain akan menggenteng rakyat kecil. Dampak ekonomis dan psikologis dari kebijakan ini terasa di mana-mana. Ini jelas menyalahi logika kebijakan distributif yang mendasari subsidi.

Jikalau dua argumen yang "sama kuat" bertemu, siapakah pemenangnya? Menurut Arif, di sinilah kontestasi kepentingan bekerja. Kepentingan pemerintah, politisi, pihak luar negeri, pasar, ideologi, dan warga bertemu dalam arena penggodokan kebijakan. Ia menyatakan semestinya kebijakan ini tidak dipahami dalam level makro dan politik-kekuasaan semata tapi lebih pada pemihakan terhadap rakyat. Namun, sekarang kita dapat melihat sendiri kepentingan mana yang menang. Suara demonstrasi di berbagai pelosok negeri ternyata masih dipahami sebagai ledakan emosi dan anarki, alih-alih tindakan kolektif dan rasional dari rakyat.

Kontestasi kepentingan juga lah yang terjadi dalam kebijakan impor daging sapi, yang dibahas oleh Wahyu Riawanti dalam bab pertama buku ini. Bedanya (atau parahnya?) kontestasi kepentingan ini dibumbui dengan tindak korupsi pejabat melalui praktek berburu rente (*rent seeking*). Wahyu menjabarkan kasus ini menggunakan kacamata ekonomi-politik, seraya berusaha menjawab pertanyaan kepentingan siap yang dimenangkan (*whose interests counts?*). Alih-alih memberdayakan masyarakat melalui peningkatan dalam sektor pembibitan ternak, kebijakan impor dengan orientasi dagang yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar lah yang terus berlanjut.

Buku ini memang mengajak kita menghadapi Indonesia yang penuh masalah. Donny Gahral Adian dalam pengantar buku ini meringkas dengan apik problem utama yang dihadapi negara kita. Politisasi birokrasi, minmalisasi kekuasaan negara, dan konsumerisme total adalah biang keladinya. Mungkin tepat pula apa yang dikatakan Giddens, dunia modern adalah dunia yang tunggang langgang (*runaway world*). Orang tak lagi memegang makna politik sebagai pengabdian kepada publik. Ekonomi tak lagi dipahami sebagai urusan mata pencaharian rakyat. Sementara sejarah tercecer menjadi barang usang. Persoalan negara menjadi banal, ia menjadi arena pertarungan kepentingan perut dan ambisi penumpukan material.

Setelah rampung membaca buku ini, saya jadi muram dan gelisah karena memang begitulah adanya negara kita. Orde Lama mengelabui kita dengan politik sebagai panglima. Kemudian Orde Baru memaksa kita obsesi pembangunan dan ekonomi. Sementara reformasi membiarkan kita terombang ambing dalam tarikan antara kepentingan politik penguasa dan akumulasi kapital. Saya kemudian menoleh pada judul buku ini, *Indonesia Bergerak!* Ia bukan semacam simpulan, ringkasan atau pemantik. Ia adalah ajakan, atau bahkan imperatif bagi kita untuk menggerakkan roda negara-bangsa yang telah macet. Ia juga menjadi pengingat betapa banyaknya masalah yang terserak di jalanan bangsa ini. Karenanya, Indonesia mesti bergerak. Gerakan itu bisa dimulai dari apapun yang kita mampu baik gerakan dalam bentuk wacana maupun aktivisme. (Muhammad Nafi', Staf Divisi Riset BPPM Balairung UGM)